

BAB III

KONDISI PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA DI KALIMANTAN

Pada bab 3 ini membahas masalah-masalah di akibatkan oleh penyelundupan narkoba di Provinsi-provisni yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan, dimulai dari permasalahan yang dialami oleh kabupaten-kabupaten di Provinsi-provinsi tersebut, terutama kabupaten yang letak geografisnya berbatasan secara langsung dengan negara Malaysia.

Dalam Bab ini peulis ingin mengetahui seberapa maraknya kasus yang terjadi di perbatasana di setiap provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini, baik itu berupa kasus-kasus penyelundupan, dampak terhadap masyarakat, seperti kesehatan di setiap provinsi dan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia ataupun mungkin kabupaten lainnya yang berdekatan dengan kabupaten yang berbatasan langsung tersebut.

A. Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Tiga provinsi

Di pulau Kalimantan terdapat tiga provinsi di wilayah negara Indonesia yang memiliki perbatasan secara langsung dengan negara tetangga Malaysia, perbatasan di tiga provinsi panjangnya mencapai lebih dari 2.000 kilometer.

Dengan panjang perbatasan yang tergolong cukup luas ini, diperlukan sarana dan prasana guna untuk menunjang masalah penjagaan perbatasan, hal ini dirasa perlu demi menciptakan keamanan yang efisien didaerah perbatasan, Berikut 3 provinsi di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Tiga provinsi yang berbatasan dengan Malaysia di Kalimantan memiliki tantangan yang cukup banyak dalam

masalah penanganan narkoba lebih lanjut akan di uraikan pada sub bab di bawah.

1. Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas (12) dua belas Kabupaten dan (2) dua kota, dari (12) dua belas Kabupaten dan (2) kota tersebut terdapat setidaknya (5) lima Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. (5) lima Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu : Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kapual Hulu. Panjang garis batas yang terdapat di (5) lima Kabupaten di Kalimantan Barat ini mencapai 857 Kilometer. (Jayanti, 2014) Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten paling banyak yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, jika di bandingkan dengan dua provinsi, lainnya.

Permasalahan narkoba menjadi hal yang sering terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia di provinsi Kalimantan Barat dari beberapa kasus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dari data kasus yang terjadi sepanjang 2016 sampai dengan awal tahun 2017 terdapat 531 kasus hal ini naik dari tahun sebelumnya yang mana terdapat 375 kasus narkoba yang terjadi di seluruh provinsi Kalimantan Barat. (Andilala, 2017)

Dengan jumlah kabupaten dengan luas perbatasan yang sangat luas di provinsi Kalimantan Barat ini bisa menjadi faktor meningkatnya kasus penyelundupan karena banyaknya perbatasan yang terdapat di provinsi ini sehingga menjadi susah dalam pengawasan perbatasan.

a. Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau adalah Kabupaten yang terletak di utara Provinsi Kalimantan Barat kabupaten sanggau memiliki luas daerah mencapai 12.857,70 km² yang mana mencakup lebih dari 12% luas

keseluruhan Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 614.807 km². (SETDA SANGAU, 2011)

Kabupaten Sangau memiliki 15 kecamatan yang berada di wilayah administrasinya, dari 15 Kecamatan tersebut terdapat 2 kecamatan yang bersinggungan atau berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia tepatnya di daerah Malaysia timur, 2 kecamatan ini adalah Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam yang memiliki garis perbatasan sepanjang 129,5 kilometer persegi. (Hartono, 2010)

Terdapat banyak kasus penyelundupan narkoba yang terjadi di daerah perbatasan di kabupaten sanggau, hal ini bisa dibuktikan dengan ,maraknya penangkapan para pelaku penyelundupan oleh pihak-pihak yang bertugas untuk menjaga perbatasan yang terdapat di kabupaten sanggau ini, data kasus terbesar dari januari hingga agustus 2017 ini yaitu penggalan penyelundupan yang dilakukan oleh BNN pada April 2017 dengan barang bukti sabu seberat 20 kg yang diselundupkan dari Malaysia dari pos lintas terpadu Entikong yang akan dibawa keluar daerah. (Faisal, 2017)

Jalur perbatasan di kabupaten sanggau terkenal sangat rawan akan penyelundupan barang illegal termasuk narkoba, terutama pada perbatasan entikong yang merupakan pos lintas batas negara yang telah resmi di karenakan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melakukan berbagai pengecekan dan pemeriksaan masih sangat minim sehingga menyebabkan masih sering lolosnya para penyelundup. Sepanjang tahun dari awal hingga pertengahan 2017 ini kejaksan negeri(cabjari) sanggau telah menangani sebanyak setidaknya 43 kasus yang mana dari 43 kasus tersebut didominasi oleh kejahatan narkoba baik itu kasus penyelundupan,penyebaran dan pemakai narkoba, (Muliani, 2017)

b. Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang dengan luas 21.638 km², menempati posisi strategis baik dalam konteks Nasional, Regional dan Internasional. Kabupaten Sintang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) serta berlanjut ke Brunei Darussalam. Dengan demikian kawasan ini akan menjadi gerbang keluar masuk barang dan orang dari dan ke Sarawak maupun Brunei Darussalam melalui jalan darat. (Sintang, 2014)

Sebagai salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dengan perbatasan mencapai 143 km² yang terbilang cukup luas, masalah penyelundupan barang illegal seperti narkoba dan lainnya di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Sintang bisa dibilang cukup tinggi, pada 2016 kasus yang berkaitan dengan narkoba di kabupaten sintang menempati jumlah kasus terbanyak dengan 32 kasus meningkat dua kali lipat daripada kasus pada 2015 di sintang yang berjumlah 14 kasus. (suarakapuasraya, 2017)

c. Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan negara ± 97 Km. (DITJENPDT, 2014)

Kabupaten sambas memiliki 19 kecamatan yang berada pada daerah administratif mereka yang mana terdapat 2 kecamatan yang berbatasan secara langsung dengan Malaysia yaitu kecamatan sajingan besar dan kecamatan paloh.

Sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia *trend* kasus penyelundupan narkoba di kabupaten sambas terbilang meningkat, terbukti dari penyampaian pers oleh Kapolres Sambas pada tahun 2016, kasus penyelundupan narkoba dari Malaysia di Sambas merupakan kasus tertinggi dibandingkan kasus lainnya yang Polres Sambas tangani. (Karsuwadi, 2016)

d. Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Sebelumnya Kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Sambas yang karena adanya Undang-undang Otonomi Daerah dimekarkan menjadi 3 daerah otonom yang terpisah. Kabupaten Bengkayang terletak di bagian utara Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. (kemendesa, 2017)

Di Kabupaten bengkayang terdapat 17 kecamatan yang berada di daerah administratif kabupaten bengkayang yang mana 2 kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan negara bagian serawak malaysia, yaitu kecamatan jagoi babang dan kecamatan siding, dengan panjang perbatasan sepanjang 76,5 km².

Dengan berbatasannya Kabupaten bengkayang dengan Malaysia menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu jalur masuknya penyelundupan narkoba lintas negara, dari beberapa kasus besar penyelundupan narkoba di bengkayang pada 2017 kasus terbesar penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 17 kg yang berhasil di gagalkan untuk masuk ke Indonesia di perbatasan bengkayang dan Malaysia. (Pradana, 2017)

e. Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas hulu terletak di ujung paling timur di provinsi Kalimantan barat, dengan luas daerah mencapai 29,843 km² dengan Ibukota Putussibau (Hartono, 2010). Kabupaten kapuas hulu memiliki 23 kecamatan di daerah administratifnya yang mana terdapat 7 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia lebih banyak dari kabupaten di kalimantan barat lainnya, diantaranya kecamatan puring kencana, kecamatan badau, kecamatan batang lupar, kecamatan embaloh hulu, kecamatan putussibau, kecamatan kedamin, dan kecamatan empanang. Luas total wilayah yang berbatasan dengana negara tetangga 52,85% dari luas kabupaten kapuas hulu. Perbatasan terluas ada di kecamatan kedamin seluas 552 km².

Di kabupaten Kapuas hulu kasus penyelundupan narkoba dari Malaysia sering terjadi dari beberapa kasus yang telah berhasil di tangani di kabupaten ini antara lain di periode awal hingga pertengahan 2017 adalah kegagalan 31kg narkoba jenis sabu dan 188 butir ekstasi, dengan kasus yang terbilang besar di kabupaten Kapuas hulu sudah menunjukkan kerawanan akan narkoba di kabupaten ini.

2. Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan timur merupakan provinsi terluas kedua setelah papua, Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km². Setelah pemekaran provinsi Kalimantan utara, jumlah kabupaten dan kota di kalimantan timur menjadi 7 kabupaten,3 kota, (bappedakaltim, 2017) berikut kabupaten di Kalimantan timur yang berbatasan dengan Malaysia.

a. Kabupaten Mahakam Hulu

Kabupaten Mahakam hulu adalah satu-satunya kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia . Mahakam hulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Luas wilayahnya 15.315,00 Km² dan pusat pemerintahannya berada di Ujoh Bilang. (DITJENPDT, 2015)

Kabupaten mahakam hulu mempunyai satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia yaitu kecamatan long apari. Total jumlah panjang perbatasan yang tersisa di kecamatan long apari hanya tersisa sebanyak 47 km² saja setelah pemekaran di lakukan. (Wikan, 2015)

Meskipun saat ini penyelundupan di perbatasan Kalimantan timur tidak semarak dulu lagi akibat banyak wilayah perbatasan kalaimanatan timur menjadi daerah pemekaran menjadi provinsi Kalimantan Utara, namun hal ini tidak bersamaan dengan pengurangan pengguna narkoba di Kalimantan timur, dari data tahun 2015-2016 provinsi Kalimantan timur berada di posisi kedua dalam masalah pengguna narkoba dalam skala nasional hal ini di hitung dari pravelensi dari jumlah penduduk. (Gunawan, 2015)

Narkoba yang masuk ke wilayah Kalimantan timur saat ini kebanyakan bukan berasal dari wilayah perbatasan yang berada di provinsi tersebut, namun berasal dari perbatasan pronvinsi Kalimantan utara yang menjadi penyuplai narkoba di daerah Kalimantan timur ini.

3. Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara

Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Kaltara adalah merupakan provinsi otonomi dari wilayah Provinsi Kalimantan timur pada april 2013. (kaltaraprov, 2017)

Kalimantan utara memiliki 4 kabupaten dan satu kota di daerah administratifnya, dan 2 diantara kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu kabupaten Malinau dan kabupaten Nunukan, di dua kabupaten ini Kalimantan utara berbatasan darat dan laut dengan Malaysia.

a. Kabupaten Malinau

Kabupaten malinau adalah kabupaten yg berada di kalimantan utara Kabupaten Malinau memiliki keluasan +3.976.716 Ha (52,69%) terluas di Kaltara dengan jumlah penduduk +71.163 ribu jiwa (Th. 2014). Pusat Pemerintahan berada di Ibukota Malinau tepatnya Kecamatan Malinau Kota. (malinau.go.id, 2017)

Kabupaten malinau mempunyai 15 kecamatan di daerahnya yang mana dari 15 kecamatan tersebut 5 diantaranya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, diantaranya adalah kecamatan Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hilir, Pujungan dan kecamatan Bahau Hulu. (Hartono, 2014)

Panjang garis batas Negara di Kabupaten Malinau membentang sepanjang 505 km. (pengetahuanhijau.com, 2016) Saat ini sebanyak 10.883 Penduduk berada di daerah perbatasan dengan kondisi yang masih dipenuhi keterbatasan baik sarana maupun prasarana.

Seperti kabupaten yang memiliki perbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan lainnya permasalahan narkoba menjadi permasalahan yang cukup memprihatinkan di kabupaten malinau, kasus narkoba

sendiri mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun 2014-2016, yang mana peningkatan pada pada kasus narkoba di kabupaten ini meningkat 100%. (KoranKaltim, 2016) Dengan jumlah perbatasan di kabupaten malinau yang terbilang cukup besar akan sangat susah sekiranya dalam melakukan pengawasan terhadap penyelundupan narkoba yang akan masuk ke Indonesia.

b. Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan satu di antara lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas wilayah sebesar 14.263,68 km². Berdasarkan geografisnya, Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia baik itu serawak dan sabah yang artinya berbatasan langsung baik itu darat dan laut dengan negara tetangga tersebut. (Beze & Suparjo, 2015)

Kabupaten nunukan terdiri dari 16 kecamatan dan 236 desa yang berada di wilayah administratifnya dari kesemua kecamatan yang berada di kabupaten nunukan terdapat 12 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu kecamatan krayan, krayan selatan, lumbis agong, tulim onsoi, sei manggaris, nunukan, nunukan selatan, sebatik barat, sebatik timur, sebatik tengah, sebatik utara. (Mita, Guryandari, Haba, Noor, Yuliana, & Rucianawati, 2017)

Kabupaten nunukan dengan wilayah kecamatan yang banyak berbatasan dengan Malaysia, baik di darat maupun dilaut membuat kabupaten nunukan harus melakukan pengamanan ekstra di

perbatasan tersebut, ditambah lagi kabupaten nunukan memiliki jumlah jalur illegal jaul lebih banyak dibandingkan perbatasan di daerah lain, jalur ini di perkirakan mencapai lebih dari 1000 jalur yang artinya harus dilakukan pengawasan dengan jumlah banyak. (Ruru, 2017)

Selain dari kasus narkoba yang secara umum meningkat di 3 provinsi di Kalimantan masalah lainnya yang ditimbulkan oleh maraknya penyelundupan narkoba adalah masalah sosial seperti kriminalitas yang meningkat dan masalah kesehatan.

Selain *trend* peningkatan kasus penyelundupan narkoba di provinsi-provinsis tersebut masalah lainnya adalah pada masalah kesehatan, narkoba menjadi salah satu pendorong meningkatnya angkat penyakit yang terjadi dimasyarakat, masalah kesehatan yang sering terjadi di masyarakat akibat akan penggunaan narkoba antara lain adalah hepatitis dan HIV/AIDS, sebagai contoh pada tahun 2014 provinsi Kalimantan barat menempati posisi 10 besar pengidap HIV AIDS skala nasional menurut pravelensi penduduk. (DEPKES RI, 2014) Yang mana narkoba jarum suntik termasuk penyebab terbesar ke dua HIV/AIDS setelah seks bebas., narkoba jarum suntik menjadi salah satu pemyumbang penyankit HIV/AIDS nomor dua di Kalimantan barat yang menunjukkan betapa banyaknya dampak buruk yang terjadi akan penggunaan narkoba di Kalimantan barat.

Tabel 3.1 Data 10 Besar Provinsi Dengan Pravelensi HIV AIDS Tertinggi

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Papua	322,9
2.	Papua Barat	215,6
3.	Bali	100,2
4.	DKI Jakarta	59,7
5.	Kaimantan Barat	34,2
6.	Sulawesi Utara	27,3
7.	Maluku	24,2
8.	DI Yogyakarta	21,1
9.	Kepulauan Bangka Belitung	19,3
10.	Sumatera Barat	18,8

Sumber: Ditjen PP & PL, Kemenkes RI 2014

Sedangkan untuk masalah sosial di tiga provinsi sendiri pemakai narkoba dengan usia di bawah umur dan usia produktif terbilang sangat tinggi, usia pengguna narkoba rata-rata di tiga provinsi antara masih di dominasi usia 20-30 tahun dan posisi kedua terbanyak berada pada usia dibawah 20 tahun, dengan demikian hal yang di khawatirkan karena pengguna narkoba yang masih pada usia produktif di tiga provinsi tersebut akan meningkatkan kasus-kasus kriminal akibat kebutuhan dalam membeli narkoba, dan penurunan kualitas pemuda yang dimiliki oleh tiga provinsi ini di kemudian hari.

B. Faktor Pendorong Mudahnya Peyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Kalimantan

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya kawasan perbatasan sebuah negara merupakan beranda depan atau muka dari sebuah negara, oleh sebab itu akan sangat penting bagi sebuah negara untuk menjaga dan melindungi keberadaan perbatasan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi wilayah dan warga masyarakat dari negara itu sendiri, pada sub bab ini penulis akan memaparkan faktor yang mendorong mudahnya aktifitas penyelundupan narkoba di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, terdapat tiga faktor utama yang mendorong mudahnya kegiatan penyelundupan narkoba dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia antara lain, pertama adalah factor minimnya infrastuktur pos perbatasan yang ditempatkan di perbatasan Indonesia dan Malaysia, yang kedua kurangnya SDM yang bertugas dalam melakukan penjagaan di daerah perbatasan ini, yang ketiga kurang pedulinya masyarakat perbatasan dengan kasus penyelundupan narkoba di wilayah mereka akibat pengetahuan yang minim pada kasus tersebut.

1. Pos Perbatasan dan Sarana Infrastuktur Penjagaan Perbatasan

Di pulau Kalimantan ini terdapat 8 kabupaten yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, terdiri dari 5 Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Satu kabupten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Dua Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, yang mana perbatasan tersebut terletak di lebih dari 20 kecamatan.

Dari ketiga provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini pos lintas batas resmi hanya terdapat di provinsi Kalimantan barat yaitu Entikong–Tebedu (Kabupaten Sanggau) dan akan menyusul Nanga Badau–Lubuk Antu (Kabupaten Kapuas Hulu) dan Aruk–Biawak atau Temajok–Telok Melano (Kabupaten Sambas) yang baru pada tahun 2017 ini diresnikan oleh pemerintah selain dengan minimnya pos lintas resmi yang

dimiliki Indonesia di perbatasan di Kalimantan yang mencapai lebih dari 2000 km minimnya sarana yang dimiliki di pos perbatasan menjadi kendala dalam aparat yang bertugas di pos lintas batas ini untuk melakukan pengecekan sehingga sering terjadinya peristiwa lolos dan masuknya barang-barang ilegal seperti narkoba dan lainnya sehingga tersebar di kawasan Kalimantan ini.

Selain tapal batas resmi yang memiliki kekurangan, kekuarangan lainnya adalah memang terdapat tapal batas atau pos lintas batas yang tidak resmi antara Sarawak Malaysia dan Kalimantan Barat, akan tetapi Sebagaimana telah diidentifikasi oleh kedua pemerintah (Kalbar dan Sarawak) bahwa dari sekitar 800 km panjang perbatasan Kalbar-Sarawak, terdapat lebih kurang 50 jalur jalan setapak yang telah diidentifikasi yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Sarawak yang sekaligus merupakan pintu atau tempat keluar masuk orang dan barang dari dan ke Sarawak/Kalbar, sedangkan pos lintas yang telah disepakati oleh kedua pihak sebagai pos keluar masuk sesuai persetujuan lintas batas tahun 1984 hanya sebanyak 10 pos saja yang telah menghubungkan 10 desa di Kalimantan Barat dan 7 kampung di negara bagian Sarawak Malaysia. (Jayanti, 2013) jumlah jalur ilegal yang di jelaskan diatas merupakan jalur yang telah diketahui saja, bisa di indikasikan masih banyak jalur lainnya yang belum di temukan di daerah Kalimantan Barat.

Selain di provinsi Kalimantan Barat jalur tikus yang lebih banyak di indikasikan di Kalimantan Utara tepatnya di kabupaten Nunukan lebih dari 10.000 'jalur tikus' sebagai tempat keluar masuknya narkoba di ketahui berada disana. (Ruru, 2017)

Dengan berbagai kekurangan dalam pengamanan pos lintas batas negara yang dimiliki oleh Indonesia, hal ini yang menyebabkan kurang terpantaunya daerah perbatasan yang dimiliki oleh Indonesia yang berada di pulau Kalimantan dan sehingga mempermudah para pelaku aktor kejahatan transnasional baik itu narkoba dan

kejahatan lainnya untuk terus menciptakan jalur-jalur illegal lainnya untuk mempermudah mereka melakukan aktivitas penyelundupan, oleh karena itu seharusnya pihak pemerintah Indonesia melakukan inisiatif untuk menambah sarana prasarana dan infrastuktur yang dimiliki oleh Indonesia di daerah perbatasan.

2. Sumber Daya Manusia yang Ditempatkan di Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan

Faktor kedua yang menyebabkan mudahnya penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan adalah kurangnya penempatan aparat yang ditugaskan dalam menjaga dan mengamankan perbatasan, dari narkoba, menurut data Satgas Pamtas RI yang memiliki anggota terbanyak dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di perbatasan Kalimantan barat dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyelundupan Narkoba. Yonif 144/JY di Sektor Barat dan Yonif 312/KH di Sektor Timur memiliki 700 orang personel, sedangkan terdapat 46 pos di sepanjang perbatasan perbatasan entikong dan sajingan dengan panjang perbatasan sepanjang 900 kilometer, ditambah dengan kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pencegahan jumlah personel masih dirasakan kurang mengingat medan dan panjang keseluruhan perbatasan di Kalimantan barat saja. (Purnomo M. K., 2016)

Dalam hal melakukan penjagaan perbatasan banyak hal yang harus dimiliki di perbatasan Indonesia di Kalimantan selain kurangnya sarana infrastuktur yang dimiliki di perbatasan permasalahan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia dalam melakukan penjagaan saat ini juga terbatas, sehingga memperbesar peluang terjadinya kegiatan-kegiatan illegal di perbatasan ini

3. Peran Masyarakat Perbatasan Dalam Menanggapi Masalah Penyelundupan Narkoba

Masyarakat sebagai salah satu elemen penting yang bertempat tinggal di suatu daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menjaga dan melindungi daerah mereka tinggal, begitupun pada kasus penyelundupan narkoba di perbatasan, dalam upaya menghambat masuknya narkoba perlunya kerjasama masyarakat sekitar, akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat akan kasus penyelundupan narkoba dan bahaya narkoba menjadi halangan tersendiri.

Pentingnya pengetahuan akan penyelundupan narkoba bermanfaat untuk terhindar dari terlibat dan mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja membantu penyelundupan. Seperti kasus yang menimpa nelayan di perbatasan di karimun yang di dimanfaatkan oleh oknum penyelundup narkoba sebagai sarana untuk membawa keluar masuk narkoba dari luar negeri ke Indonesia. (Putra E. , 2017) Pada kasus lainnya di perbatasan entikong sering terjadi penyelundupan narkoba melibatkan warga setempat yang keluar masuk membawa dagangan ataupun barang kebutuhan lainnya sebagai penyamaran.

Oleh karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga harus sering berkoordinasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan agar mengetahui dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, menyuluhkan tentang bahaya narkoba dan hukuman bagi yang melakukan kegiatan penyelundupan dan mengedarkan narkoba bagi warga perbatasan agar mereka merasa takut dan merasa bertanggung jawab untuk membantu atau paling tidak menjaga daerah mereka dari penyelundupan narkoba.

Dalam bab ini penulis ingin menggambarkan posisi tiga provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dengan perbatasan seluas lebih 2000 km² namun dengan berbagai kekurangan di miliki, seperti kurangnya sarana dan infrastuktur seperti pos penjagaan

perbatasan alat-alat guna pengecekan barang illegal, selain sarana dan prasarana masalah lainnya terdapat pada sumber daya manusia baik itu jumlah personil yang ditetapkan di daerah perbatasan tersebut guna penjagaan serta kurangnya pengetahuan dan keikutsertaan masyarakat perbatasan di dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi oleh pemerintah sehingga menyebabkan perbatasan tersebut sangat mudah bagi penyelundup narkoba untuk melakukan aktivitas mereka disana.

Dalam kasus maraknya penyelundupan narkoba di perbatasan Kalimantan ini menyebabkan, meningkatnya kasus-kasus narkoba di daerah kabupaten-kabupaten yang berada di perbatasan tersebut, hal ini bukan saja menimpa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang menerima dampak besar namun juga kabupaten tetangga yang berbatasan dengan wilayah perbatasan menjadi daerah rawan bagi peredaran narkoba dan memiliki dampak yang sangat buruk dari penggunaan narkoba itu sendiri, karena dengan meningkatnya masalah narkoba tentunya akan meningkatkan pula masalah-masalah yang akan ditimbulkan karena akibat dari penggunaan narkoba itu sendiri, masalah yang ditimbulkan ini antara lain seperti masalah pada bidang kesehatan, masalah sosial dan berbagai masalah lainnya yang tentunya memiliki dampak buruk bagi keamanan daerah tersebut.